

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunannya. Saat ini di Indonesia pemenuhan dana bagi penyelenggaraan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pinjaman dari luar negeri. Dalam perkembangan perekonomian nasional, penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri harus semakin berkurang dan pada saatnya kelak pinjaman ini harus ditiadakan sehingga ketergantungan sumber dana kepada pihak luar negeri dapat dihilangkan.

Ketergantungan pendanaan yang berasal dari luar negeri akan dapat diakhiri dengan cara meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pembangunan dan kebutuhan dana rutin menjadi semakin tinggi sehingga ketergantungan pendanaan dari luar negeri hanya akan dapat diakhiri dengan cara meningkatkan penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri yang sangat diharapkan mengganti dana pinjaman luar negeri adalah peningkatan dari sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan dalam negeri jelas kelihatan dengan semakin besarnya realisasi penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak dari tahun ke tahun di dalam APBN.

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan Negara yang berlaku diberbagai negara. Setiap negara membuat aturan dan ketentuan-

ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya masing-masing. Di Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan penting dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi yang berfluktuasi di pasar internasional dalam kurun waktu yang relatif panjang pada awal dekade 1980-an. Fluktuasi harga saat itu telah membuat struktur penerimaan negara sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) yang sekarang ini tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya. Dari aspek penganggaran, bila penerimaan yang diandalkan dari migas tetap dipertahankan, maka akan dapat merusak tatanan atau struktur penerimaan negara dalam APBN. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan nasional yang telah direncanakan dan diprogramkan di berbagai bidang, yang membutuhkan biaya saat itu, bisa jadi tidak dapat berjalan dengan baik bahkan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana (program pembangunan).

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu

prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersialnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul "**Mengkoreksi laporan keuangan fiskal PT. JASUINDO TIGA PERKASA berdasarkan laporan keuangan komersial**".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah "Item-item apa sajakah yang dapat dikoreksi dari PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Sidoarjo berdasarkan laporan keuangan

komersil yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menganalisa perbedaan temporer dan perbedaan tetap atas akun pendapatan dan beban pada PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Sidoarjo.
2. Mengkoreksi laba komersial menjadi laba fiskal PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Sidoarjo menurut Standar Akuntansi Keuangan dan UU PPh.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai Masukan bagi perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersilnya.

2. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuannya khususnya dalam bidang akuntansi koreksi fiskal dan akuntansi pajak penghasilan yang tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk menganalisis koreksi fiskal pada laporan keuangan komersil.